



## Harry Azhar Aziz, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan : Pengelolaan Keuangan Harus Untuk Kemakmuran Rakyat

**B**adan Pemeriksa Keuangan telah memasukierakepemimpinan baru sejak akhir Oktober tahun lalu. Sejak dilantik, Harry Azhar Aziz, yang menggantikan Ketua BPK sebelumnya, Rizal Djailil, berkomitmen pemeriksaan BPK ke depan ditujukan agar pengelolaan keuangan negara diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebab, menurut Harry, pengelolaan keuangan negara yang semakin baik seharusnya diikuti dengan berkurangnya kesenjangan pendapatan masyarakat. Kepada Martha Thertina dan Frannoto Suip dari *Tempo*, mantan politikus senior Golkar ini berbicara panjang-lebar soal rencana audit belanja pemerintah yang bakal bergerak lebih jauh. Berikut ini petikan dari wawancara yang berlangsung sekitar satu setengah jam di ruang kerja di lantai 17, Jumat dua pekan lalu.

**Bisa dijelaskan, ke mana pemeriksaan BPK akan berfokus di masa mendatang?**

Filosofinya dulu yang harus dipahami. Pemeriksaan pengelolaan keuangan itu, menurut *founding fathers* kita, untuk memastikan pemenuhan tiga unsur, yakni keterbukaan, bertanggung jawab, dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kalau uang Rp 100 miliar dibelikan oleh APBD atau APBN permen, lalu dilaksanakan oleh presiden, gubernur, bupati,

wali kota membeli permen dengan cara yang tepat, kami periksa ada buktibuktinya. Apakah kami akan memberikan opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat)? Tidak, kami akan tetap memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), karena dia *comply* aturan.

Tapi ada pertanyaan yang lebih besar, apakah permen itu menyejahterakan rakyat? Kenapa tidak beli susu, beras, daging, ikan? Pertanyaan itu tidak muncul, belum muncul, atau masih kecil. Itu yang saya mau dorong di BPK.

**Artinya akan banyak audit kebijakan, ya, Pak?**

Itu yang nanti masuk audit kinerja. Saya sedangmencaricara juga di dalam audit keuangan, pasti akan muncul itu. Misalnya, belanja birokrasi di daerah-daerah itu 70 persen, belanja modal 10 persen. Sampai kiamat seperti itu, rakyat pilih bupati siapa pun tetap gigit jari. Nah, saya minta itu diteliti, rasio-rasio belanja, mana pola belanja yang menyemana pola belanja yang membuat rakyat semakin menderita.

**Sektor-sektor apa yang akan diaudit lebih dalam ke depan?**

Pertama, sektor kesejahteraan rakyat yang *direct individual* ke rakyat. Pak

Jokowi ingin kami meneliti program kartu pintar dan kartu sehat, misalnya. Meskipun sudah pakai *cash*, saya mau pastikan, di ujungnya, apakah penerimanya betul-betul orang miskin, atau anak ketua RT, anak lurah atau tetangga lurah, atau apa.

**Sektor lainnya?**

Mungkin nanti audit dilakukan ke program-program lainnya yang secara tidak langsung membuat kesejahteraan rakyat. Misalnya, ketika jumlah dana masuk ke infrastruktur, itu menghasilkan berapa jumlah lapangan kerja dibanding satu jumlah dana masuk ke belanja subsidi, misalnya.

**Soal penerimaan negara, Perhimpunan Prakarsa menyebut realisasi penerimaan tahun 2014 terendah sepanjang 25 tahun, cuma sekitar 91 persen. Ada rencana untuk mengaudit kinerja Ditjen Pajak?**

Untuk itu, ada yang harus diubah dulu. Di Undang-Undang Perpajakan, informasi tentang wajib pajak tidak bisa diakses selain oleh Ditjen Pajak, sama dengan rekening bank, itu tidak bisa diakses. Kami juga tak bisa masuk (audit Ditjen Pajak), kecuali ada beberapa kasus tertentu dan itu seizin Menteri Keuangan. Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan dan Presiden, tapi belum terlalu

tegas. Tapi saya sudah sampaikan beberapa halangan perundang-undangan.

**Apakah audit kinerja Ditjen Pajak akan sulit dilakukan?**

Saya sedang mencari celah untuk mengaudit karena ada beberapa data perpajakan di undang-undang yang diperbolehkan dibuka, misalnya data-data yang sifatnya kolektif. Tapi data individual tidak bisa. Kami bisa meneliti, misalnya, dari total industri di Jakarta Pusat berapa tingkat pendapatannya, seharusnya setoran pajak berapa, nah itu bisa kita bandingkan. Jadi, kami tak harus menunggu revisi undang-undang. Kami ini bukan orang yang bodoh-bodoh amat.

**Setelah ada kesepakatan, bagaimana realisasi *hedging* utang luar negeri dari BUMN hingga kini?**

Saya sudah baca konsep kesepakatan (*hedging* utang BUMN tak dianggap sebagai kerugian negara), tapi tidak ada yang tanda tangan. Tidak mungkin kami pakai itu sebagai aturan. Ini yang membuat direksi BUMN belum terlalu gembira karena belum pasti.

Kalau BPK disuruh ikut aturan, paling kami kembali ke Undang-Undang PT, BUMN, Peraturan BI, Peraturan Menteri BUMN, apa betul ada persis seperti itu?

**Soal tudingan jual-beli opini BPK, Anda sempat merencanakan audit ulang, bagaimana kelanjutannya?**

Itu yang mekanismenya belum ada. Saya sudah



tanya ke sana-kemari. Dulu, bila hasil audit walaupun salah, sifatnya final dan mengikat. Ini yang saya tidak terlalu setuju. Masak kita mempertahankan yang salah.

**Dengan latar belakang politik yang kuat di Golkar, banyak yang mempertanyakan apakah Anda bisa independen ketika menjabat di BPK?**

Ini karena politik kita lebih banyak *labeling*, tidak ada *individual character*. Walaupun saya dulu Golkar, apakah karena di BPK, saya tutup pintu sama sekali ke Aburizal Bakrie? Lain halnya kalau dia (Aburizal) memerintahkan dan saya ikut.

Tapi, kalau misalnya silaturahmi, *ngopi-ngopi*; mendiskusikan sesuatu yang hubungannya untuk negara, apakah tidak boleh? Toh, keputusannya ada di kita. Kita cuma tunduk pada pemahaman terhadap kemandirian dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kita tak bertanggung jawab pada siapa pun. ●

#### Riwayat Pekerjaan:

- 2009-2014, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau
- 2004-2009, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau
- 2003-2004, Anggota Komisi Konstitusi MPR
- 2002-2003, Business Development Expert Badan Operasi Bersama (BOB) PT Pertamina- PT Bumi Siak Pusako
- 2002-2003, Economist pada United States Agency for International Development (USAID), Jakarta
- 2001 dan 2002, Tim Ahli Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR
- 2001-2004, Staf Ahli Fraksi Partai Golkar MPR
- 1986-2003, Dosen di sejumlah universitas, seperti Universitas Indonesia, UPN "Veteran", Universitas Jayabaya, Universitas Mercu Buana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, STIMA KOSGORO, Universitas Tarumanagara, dan Universitas Islam Assyafii'yah
- 1985-1987, Peneliti Senior PAN Asia Research

#### BIODATA

**Nama :** Harry Azhar Azis

**Tempat, Tanggal Lahir:**

Tanjung Pinang, 25 April 1956

**Latar Belakang Pendidikan :**

- 1994-2000, Doctor of Philosophy (PhD) Bidang Ekonomi, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat
- 1988-1990, Master of Arts (MA) Bidang Kebijakan Ekonomi Publik, University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat
- 1981-1985, Sarjana Manajemen Industri (M.Sc.), Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Departemen Perindustrian RI, Jakarta
- 1975-1980, B.Sc. Manajemen Perusahaan, Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian RI, Jakarta